

Prosiding Seminar Nasional

Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 130 - 136

Peran Organisasi PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Wilianus Yudono¹, Purwito Adi²

Universitas Kanjuruhan Malang Indonesia

Wilianusyudono123@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
Peningkatan ekonomi
masyarakat.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan umat manusia yang tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan, salahsatunya aspek ekonomi, dalam pemenuhan Kebutuhan ekonomi setiap manusia semakin hari semakin bertambah dan tidak pernah ada rasa kepuasan dalam diri setiap individu, salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat desa dan kelurahan adalah PKK, di era globalisasi saat ini dimana persaingan merupakan faktor dominan, dan masyarakat kota yang modern yang dikenal dengan ritme kerja yang tinggi serta kesibukan yang menyita seluruh waktu, maka PKK dituntut untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap serta kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat. Meningkatkan pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini dibutuhkan mobilisasi dari seluruh potensi dan kreatifitas dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai dengan situasi yang dialami manusia dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk mengetahui peran organisasi PKK dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perlu mengkaji kebenaran dari argumen melalui penelitian dan mendekati dengan warga agar mendapatkan jawaban yang akurat dari informan maupun responden. Penelitian kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menggali informasi tentang organisasi PKK pada masyarakat. Prosedur pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran Organisasi PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan koperasi, wirausaha, dan peningkatan pendidikan serta keterampilan.

Copyright ©2019 Wilianus Yudono¹, Purwito Adi² All Right Reserved

Pendahuluan

Kehidupan umat manusia tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek ekonomi. Dalam pemenuhan Kebutuhan ekonomi setiap manusia semakin hari semakin bertambah dan tidak pernah ada rasa kepuasan dalam diri setiap individu. Dalam era jaman ini tidak hanya laki-laki yang berperan penting dalam mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, namun peran wanita sangat juga dibutuhkan dalam membangun ekonomi keluarga. Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi serta mengelompokkan organisasi perempuan dibawa departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Shalfiah, 2013)

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat desa dan kelurahan adalah PKK. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama terbentuknya PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Sesuai amanat Pemendagri Nomor 5 Tahun 2007 (Undang-undang, 2013) menyatakan bahwa PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Hasil dari keputusan tersebut tentunya dapat meningkatkan kedudukan PKK dalam masyarakat. PKK mampu membuktikan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, mendapat respon yang positif dari organisasi ini dengan ikut terlibat dalam memudahkan tugas aparat pemerintah daerah. PKK terus menjadi mitra Pemerintah selama kerja sama yang dijalankan memberikan dampak yang baik bagi PKK dan yang terpenting masyarakat luas.

Di era globalisasi saat ini dimana persaingan merupakan faktor dominan, dan masyarakat kota yang modern yang dikenal dengan ritme kerja yang tinggi serta kesibukan yang menyita seluruh waktu, maka PKK dituntut untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap serta kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat. Demikian pula dalam kondisi saat ini, dimana masyarakat semakin kritis, maka bagi Tim Penggerak PKK dihadapkan pada paradigma baru sesuai kondisi saat ini agar muncul kreativitas bagi anggota PKK. Dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Tim penggerak PKK harus peka terhadap perubahan yang mendasar, sehingga menjadi landasan bagi Gerakan PKK untuk memasuki masa depannya dan dapat memberikan darma bakti serta sumbangsinya bagi masyarakat, bangsa dan negara yang sedang membangun (Anshar, 2017) Kesadaran akan tantangan globalisasi menjadi semangat bagi PKK untuk lebih berperan secara aktif lagi.

PKK perlu memahami betapa pentingnya kehidupan bertetangga, bermasyarakat, dan pentingnya kebersamaan di lingkungan masyarakat, sehingga wajib untuk mengembangkan dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama secara terorganisasi sekaligus untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) memiliki suatu pedoman yang mengatur aturan internal organisasi serta memuat aturan-aturan diberbagai bidang untuk kebaikan warga di lingkungan (Dwi & Agustin, 2016) Sehingga setiap organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta menjauhi tindakan-tindakan yang dapat menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun tindakan pidana. PKK mampu berpartisipasi dengan masyarakat, dengan begitu tim penggerak PKK dapat mengetahui semua masalah yang ada dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi masyarakat kurang mampu.

Di era globalisasi saat ini dimana persaingan merupakan faktor dominan, dan masyarakat kota yang modern yang dikenal dengan ritme kerja yang tinggi serta kesibukan yang menyita seluru waktu, maka PKK dituntut untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap serta kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat. Demikian pula dalam kondisi saat ini, dimana masyarakat semakin kritis, maka bagi Tim Penggerak PKK dihadapkan pada paradigma baru sesuai kondisi saat ini agar muncul kreativitas bagi anggota PKK. Dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Tim penggerak PKK harus peka terhadap perubahan yang mendasar, sehingga menjadi landasan bagi Gerakan PKK untuk memasuki masa depannya dan dapat memberikan darma bakti serta sumbangsihnya bagi masyarakat, bangsa dan negara yang sedang membangun (Anshar, 2017). Kesadaran akan tantangan globalisasi menjadi semangat bagi PKK untuk lebih berperan secara aktif lagi.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini dibutuhkan mobilisasi dari seluruh potensi dan kreatifitas dalam masyarakat. Perempuan merupakan juga bagian dari masyarakat dan penduduk Indonesia, dan juga merupakan potensi tenaga kerja tetapi belum sempat dimanfaatkan sepenuhnya dan pelatihan yang cukup bagi perempuan yang minim akan pendidikan formal, didalam proses pembangunan terutama dipelosok-pelosok desa. Dengan kinerja Tim Penggerak PKK tersebut, harapannya adanya partisipasi aktif ibu-ibu anggota PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Selanjutnya dalam teknis kerjanya Tim Penggerak PKK dibantu oleh Kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan kelompok Dasawisma (Anshar, 2017). Terwujudnya partisipasi tim penggerak PKK dapat mempercepat terwujudnya visi misi dari organisasi PKK yang menitikberatkan pada pemantapan dalam ekonomi keluarga.

Metode

Metode-metode yang digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses berpikir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan mendapatkan data deskriptif berupa lisan melalui wawancara atau kata-kata yang diamati dan di teliti. Agar sesuai dengan data-data yang di perlukan, penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan

Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti melakukan observasi dilokasi penelitian. Dengan melakukan terhadap ibu PKK, dan kegiatan yang dilakukan oleh ibu PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam bidang ekonomi. Dari hasil observasi dilokasi yang di temukan bahwa organisasi PKK akan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara bertatapapan muka dengan ibu-ibu PKK. Bahwa organisasi PKK sangat penting bagi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia bagi ibu-ibu semakin meningkat, pemanfaatan barang bekas akan menjadi berguna. Dari beberapa hal diatas bahwa peran organisasi PKK sangat bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi PKK juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berupa pelayanan dalam kesehatan seperti posyandu.

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto kegiatan yang dilakukan oleh ibu pkk seperti kegiatan posyandu, foto kegiatan pemanfaatan lahan kosong sebagai tanaman sayur-sayuran, foto kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan, serta foto hasil wawancara. Berdasarkan sumber data primer yang berupa yang berupa wawancara dan observasi serta data skunder yang berupa data skunder maka dapat di simpulkan bahwa ada hubungannya antara observasi, wawancara dan dokumentasi guna menjawab rumusan masalah tentang bagaimana peran organisasi PKK dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang mana hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Telah di temukan data yang berkesinambungan untuk di analisis.

Lahirnya organisasi PKK dalam masyarakat berawal dari terbentuknya otonomi daerah disejumlah daerah diindonesia, sehingga memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing termasuk menggerakkan komponen masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut sejarahnya, PKK semula merupakan akronim dari pendidikan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui program pendidikan perempuan (Lilik Aslichati, 2011). Kemudian pada tanggal 27 desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga dibidang mental, spritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan dan lingkungan hidup. Keanggotaan PKK adalah seluruh komponen lapisan masyarakat, terlebi khusus kaum perempuan yang kurang mendapat kesempatan dalam pendidikan formal, mereka yang berada dalam kondisi ekonomi menengah bawah.

Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dalam masyarakat dan semangat lahirnya otonomi daerah, sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lilik Aslichati, 2011). Dalam perubahan tersebut perlu ditekankan bahwa, kata pemberdayaan perempuan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai sebuah kesejahteraan dan kesejahteraan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Meningkatkan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam diri perempuan Indonesia, kemudian ditunggangkan dalam wadah yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku ekonomi.

Akan tetapi sesuai dengan perkembangan organisasi PKK dimasyarakat, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengandung arti bahwa organisasi PKK mampu menggerakkan roda perekonomian dengan adanya kerja sama antara perempuan dan laki-laki menjadi selaras dalam satu kesatuan. Dengan demikian sasarannya ditunjukkan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada dalam diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Biro pemberdayaan perempuan kementerian peranan wanita, 2007). Hal tersebut diperkuat dengan partisipasi pemerintahan Indonesia terhadap deklarasi Milenium Summit di New York Amerika tahun 2008. (Lilik Aslichati, 2011). Tujuannya adalah dengan meningkatkan kesetaraan gender dan peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.

Peran PKK dalam bidang pangan adalah bagaimana mengupayakan ketahanan pangan keluarga melalui aneka ragam yang menjadi sasaran tercapainya kualitas hidup dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. (Yanzi, n.d.). Program pangan tidak terlepas dari kebutuhan primer maupun yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Dalam program pangan yang dirancang oleh PKK memiliki tujuan agar setiap anggotanya mampu memanfaatkan setiap lahan kosong yang ada disekelilingnya untuk menjadi sumber bahan pangan tersebut dan tidak selalu bergantung pada produk pasar. Dengan begitu pemanfaatan lahan kosong dapat berguna bagi kebutuhan pangan.

Adapun peran PKK dalam bidang kesehatan agar keluarga dapat menciptakan keluarga yang sadar akan pentingnya kesehatan dan lingkungan yang bersih. Menurut (Kadma, 2017) program kesehatan yaitu dalam hal kesehatan PKK mempunyai perhatian yang besar dalam memantapkan keluarga yang sadar gizi, posyandu dan pentingnya program KB. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PKK dapat mengoptimalkan kesehatan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kesadaran keluarga dan masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan menghindari gizi buruk dalam lingkungan masyarakat.

Dalam program perencanaan kesehatan yaitu meningkatkan pengetahuan kesadaran keluarga tentang pentingnya budaya hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, ISPA, DBD dan lainnya. Menurut (Jhovan, 2012) Dari pendapat di atas PKK memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang bersih agar terhindar dari penyakit serta bagaimana pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Bagaimana peran PKK dalam menghilangkan hal yang buruk yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang bahaya lingkungan yang tidak kondusif terutama bagi anak-anak. Terciptanya keluarga yang sehat dan peduli terhadap pola hidup sehat adalah dari program yang dirancang oleh PKK ini.

Pada peran organisasi PKK pada tingkat nasional Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang hasilnya terlihat dari peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam tingkat nasional peran organisasi PKK sangatlah besar, karena sebagai acuan dan tolak ukur bagi organisasi PKK yang ada ditingkat daerah maupun wilayah terkecil yaitu RT/RW. Para kader PKK tingkat nasional dituntut untuk menjadi pemersatu organisasi PKK diseluruh wilayah Indonesia, dengan membuat suatu program yang dapat membawa kader-kader PKK yang dibawanya bisa bersaing secara maksimal, baik ditingkat kelurahan, kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Dengan begitu organisasi PKK dari wilayah terendah maupun meningkatkan kualitas SDM perempuan Indonesia dan mewujudkan kemitraan organisasi PKK dari seluruh wilayah. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana, dan berkelanjutan (Lilik Aslichati, 2011)

Peran organisasi PKK nasional dapat kita lihat dalam setiap kegiatan yang telah diselenggarakan, seperti mengadakan lomba tingkat nasional, sebagai contoh, seperti apa yang dikemukakan oleh (Yanzi, n.d.) diantaranya: 1) lomba tertib administrasi, yang diadakan satu kali dalam setahun. 2) Lomba pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). 3) lomba pemanfaatan barang bekas. Dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi PKK tingkat nasional ini, diharapkan mampu memberdaya perempuan Indonesia agar bisa menjadi wanita karir sekaligus menjawab semua tantangan dalam era globalisasi. Kegiatan tersebut sebagai salah satu cara

Agar organisasi PKK bisa meningkatkan bakat yang dimiliki serta kemampuan mereka untuk bersaing dengan organisasi PKK yang lain. Lewat kegiatan inilah yang dapat menguji sejauh mana organisasi PKK dapat mengukur kemampuannya masing-masing.

Pada peran organisasi PKK ditingkat RT/RW, sebagai lembaga kemasyarakatan dan mitra pemerintah daerah, memiliki peranan yang sangat besar dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya kegotongroyong dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka sangat diperlukan sistem keorganisasian PKK dalam tingkat RT/RW, menurut (Dwi & Agustin, 2016) menyatakan bahwa : 1) Menggerakkan ibu-ibu disekitarnya agar bisa menjadi kader PKK yang bisa atau sama-sama menggerakkan organisasi PKK yang lebih bermutu dan berkualitas . 2) Memberdaya perempuan dalam ekonomi. 3) Membantu melayani pelayanan ditingkat RT/RW. 4) Memelihara kebersihan lingkungan serta ketertiban masyarakat dalam lingkup wilayah RT/RW.

PKK dapat meningkatkan dalam kehidupan sosial keluarga merupakan cara hidup yang didukung oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam arti yang lebih luas, keluarga hidup ditengah-tengah perkembangan peradapan tradisional sampai era globalisasi, dimana persaingan semakin ketat. Pembentukan keluarga ini tidak akan terlepas dari kondisi dan lingkungan yang terdapat disekitarnya, serta bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan disekitar. Berkaitan dengan hal ini tentunya pembentukan keluarga sejatra sangat ditentukan oleh lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Indikator kesejahteraan keluarga pada dasarnya berangkat dari pokok pemikiran yang terkandung dalam undang-undang no 10 tahun 1992 serta asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel yang komposit yang terdiri dari beberapa indikator yang spesifik dan operasional (Dwi & Agustin, 2016).

Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Khususnya keluarga miskin, dimana dibawah kondisi ekonomi yang rendah. Dalam kesejahteraan sosial, dilakukan berbagai cara dan pelayanan agar keluarga-keluarga miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya menuju pada keluarga sejatra lahir dan batin, yaitu dengan dapat terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasar serta bagaimana mereka bisa bertahan dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat. kesejahteraan sosial pada intinya mencakup konsep antara lain, yaitu kondisi kehidupan atau keadaan sejatra, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial (Desi Arisandi1, 2015)

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial anggota keluarga, keadaan yang harmonis, damai, sejatra serta dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga merupakan dambaan semua keluarga. Terwujudnya keadaan ini tentunya tidak mudah dalam menjalankannya. Dengan gerakan PKK ini mampu menciptakan keluarga yang sejatra dan harmonis (Desi Arisandi1, 2015)

Adapun keluarga sejatra merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga, meningkatnya kesejahteraan keluarga sifatnya kodisional, tentu perlu adanya ukuran-ukuran dari keadaan tersebut. Dengan kata lain ada indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai taraf keluarga sejatra yang seperti yang tercantum dalam buku panduan pembangunan keluarga sejatra (seperti yang ditetapkan oleh BKKBN, terdapat 2 indikator), maka keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang sejatra (Lilik Aslichati, 2011)

Dalam peran organisasi PKK bagi masyarakat program-program kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Karena setelah mengikuti berbagai program-program dan pelatihan-pelatihan sebagai anggota mangalamai kenaikan pengahsilan serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Meskipun dalam skala yang kecil namun hal tersebut membawa dampak yang positif baik bagi anggota maupun masyarakat. Pemberian ketrampilan serta manajemen ekonomi yang baik memberikan motivasi kepada anggota PKK sehingga mereka lebih maju dalam meningkatkan taraf keluarga. Serta memberikan layanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat baik, memberikan materi maupun berupa pelayan jasa yang sangat berguna (Suparjan, 2003).

Bentuk pelayanan kepada masyarakat tentunya beraneka ragam, salah satunya dampak adanya organisasi PKK dalam bentuk pelayan seperti memberikan ruang bagi masyarakat sebagai wadah dalam pemecahan persoalan dalam masyarakat, dalam hal membantu tugas dari aparaturnya tingkat RT/RW.

Layanan dalam bidang jasa lebih diutamakan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat KB (sosialisai), permasalahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, setiap organisasi PKK yang tersebar diseluruh Indonesia. "Sehagianya PKK memberikan pengaruh yang lebih besar bagi masyarakat untuk mewujudkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat, pelayanan yang bermutu, pengabdian, serta tingkat kreatifitas masyarakat yang bermutu dan berkualitas (Tim Penggerak PKK).

Sumber pembiayaan PKK adalah swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda organisasi PKK. Bantuan dari pemerintah dan bantuan dari sumber-sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong, pembantu dan peransang untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, dan PKK tidak berpatokan pada hal tersebut, melainkan kerja sama yang bertujuan mewujudkan 10 program pokok tersebut. Sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

kesejahteraan keluarga serta bagaimana meningkatkan peran dalam masyarakat melalui organisasi PKK. Menurut (Shalfiah, 2013) dalam pelaksanaannya, pemimpin dan pengurus PKK merupakan istri para pejabat wilayah setempat) untuk daerah provinsi/kota/kabupaten) dan istri-istri pejabat.

Program pendidikan dan ketrampilan dalam organisasi PKK yang menjadi salah satu program pokoknya menurut (Kadma, 2017) yaitu peran PKK dalam pemberdayaan perempuan dilihat dari program PAUD (pendidikan anak usia dini), Pendidikan mengaji, dalam program pendidikan ketrampilan yang dilakukan oleh PKK merupakan salah satu program favorit, seperti kerajinan tangan. Program ini diharapkan PKK mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga maupun masyarakat. Keluarga diajak untuk berpartisipasi dalam penyuluhan tentang manfaat pendidikan bersama masyarakat dan memberikan pelatihan dalam bidang ketrampilan. Partisipasi masyarakat tentunya dapat memberikan dampak yang positif dalam mewujudkan program pokok PKK tersebut.

Peran PKK dalam kegiatan kesehatan agar keluarga dapat menciptakan keluarga yang sadar akan pentingnya kesehatan dan lingkungan yang bersih. Menurut (Kadma, 2017) Program kesehatan yaitu dalam hal kesehatan PKK mempunyai perhatian yang besar dalam memantapkan keluarga yang sadar gizi, posiandu dan pentingnya program KB. Dari pendapat disimpulkan bahwa PKK dapat mengoptimalkan kesehatan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kesadaran keluarga dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang bersih dan menghinar gizi buruk dalam lingkungan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi pada masa sekarang ini dibutuhkan mobilisasi dari seluruh potensi dan kreatifitas dalam masyarakat. Perempuan merupakan juga bagian dari masyarakat dan penduduk Indonesia, dan juga merupakan potensi tenaga kerja tetapi belum sempat dimanfaatkan sepenuhnya dan pelatihan yang cukup bagi perempuan yang minim akan pendidikan formal, didalam proses pembangunan terutama diplosok-plosok desa. dengan kinerja tim penggerak PKK tersebut, harapannya adanya partisipasi aktif ibu-ibu anggota PKK dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Selanjutnya dalam teknis kerjanya tim penggerak PKK dibantu oleh kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan kelompok dasa wisma (Anshar, 2017). Terwujudnya partisipasi tim penggerak PKK dapat mempercepat terwujudnya visi-misi dari organisasi PKK yang menitik beratkan pada pematapan dalam ekonomi keluarga.

PKK perlu memahami betapa pentingnya kehidupan bertetangga, bermasyarakat, dan pentingnya kebermasaaan dilingkungan masyarakat sehingga wajib untuk mengembangkan dan meningkatkan kerukunan dan kerja sama secara erorganisasi sekaligus untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan panca sila dan undang-undang dasar 1945. Dalam pasal 1 anggaran dasar rumah tangga (ADRT) memiliki suatu pedoman yang mengatur aturan internal organisasi serta memuat aturan-aturan diberbagai bidang untuk kebaikan warga dilingkungan (Dwi & Agustin, 2016). Sehingga setiap organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta menjauhi tindakan-tindakan yang dapat menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ataupun tindakan pidana. PKK mampu berpartisipasi dengan masyarakat, dengan begitu tim penggerak PKK dapat mengetahui semua masalah yang ada dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi masyarakat kurang mampu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlunya peran wanita yang dipercaya sebagai penggerak dan memiliki posisi yang baik dalam negeri ini, wanita yang berkarir dalam dunia pendidikan dan mereka yang tidak mendapat kesempatan dalam dunia pendidikan serta memahami pentingnya masa depan keluarga yang sejahtera dan tentram. Selain peran wanita, pemerintah setidaknya juga harus mengambil bagian dan turut serta dalam setiap organisasi yang memiliki daya saing dan berdampak luas bagi pembangunan perekonomian nasional. Tujuan yang jelas serta mampu mendukung pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Jhovan, 2012). PKK setidaknya mampu menarik perhatian pemerintah agar dalam pelaksanaan tugasnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat dan mendapat kepercayaan untuk bersama-sama melayani masyarakat. Dengan pelayanan tersebut setidaknya masyarakat diberi kemudahan dalam persoalan yang dihadapi.

Untuk membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk gerakan pembinaan kesejahteraan keluarga. Yang mekanisme gerakannya dikelola suatu tim, yaitu Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TPPKK). Gerakan pembinaan dan kesejahteraan keluarga adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, untuk dan oleh masyarakat dengan wanita sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri. Pembinaan perempuan dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga menjadi hal yang mutlak serta menjadi tolak ukur dalam keberhasilan organisasi PKK (Jhovan, 2012).

Sumber pembiayaan PKK adalah swadaya gotongroyong dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda organisasi PKK. Bantuan dari pemerintah dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong, pembantu dan peransang untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, dan PKK tidak berpatokan pada hal tersebut, melainkan kerja sama yang bertujuan mewujudkan 10 program pokok PKK tersebut. Sehingga pada awalnya keberadaany PKK merupakan salah satu tindakan lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga serta bagaimana meningkatkan peran dalam masyarakat melalui organisasi PKK. Menurut (Shalfiah, 2013). dalam pelaksanaannya, pemimpin dan pengurus PKK merupakan istri-istri para pejabat wilayah setempat (untuk daerah provinsi/kota/kabupaten) dan istri-istri pejabat setempat.

Pada prinsip dasar program PKK kesejahteraan keluarga didasarkan pada prinsip-prinsip yang dimana nantinya: *partisipatif*, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan dalam setiap tahapan dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku dan kelompok masyarakat miskin dan marginal lainnya (Ripca). Dengan adanya prinsip partisipatif diharapkan PKK dalam setiap pengambilan keputusan dapat mengambil semua masukan dari semua pihak. Masyarakat diharapkan dapat terlibat bersama-sama dengan pengurus PKK serta mengutamakan musyawara dan mufakat. Semua ini bertujuan agar PKK dapat menghormati prinsip-prinsip yang ada.

Pada pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat serta dapat mempertanggung jawabkannya kepada semua pihak.(Ripca). Keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan menjadi hal yang penting yang harus diamalkan oleh organisasi PKK yang ada dimasyarakat. Semua keterbukaan PKK dalam setiap pelaksanaan kegiatannya harus mendapat respon yang baik dari masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan PKK. Dengan begitu PKK dapat terhindar dari permasalahan yang dapat merusak citra PKK dalam masyarakat.

Dalam keterpaduan, bahwa pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang tersedia serta mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah (Dwi & Agustin, 2016). PKK diharapkan mampu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat yang dimana hasilnya nanti dapat berguna baik bagi PKK maupun masyarakat. Pengelolaan setiap kegiatan PKK juga harus mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Partisipasi pemerintah diharapkan mampu mendorong PKK untuk dapat menjalankan semua kegiatannya dengan utuh dan bertanggung jawab.

Pada *sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan sesuai dengan potensi, kondisi dan kinerja yang ada (Dwi & Agustin, 2016)

Pada *sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan sesuai dengan potensi, kondisi, dan kinerja yang ada (Dwi & Agustin, 2016). Menumbuhkan peran masyarakat dalam memelihara serta pemanfaatan dalam pengembangan kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan yang disini dapat berupa kegiatan dalam bidang kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan yang berkelanjutan disini dapat berupa kegiatan dalam bidang pendidikan maupun ketrampilan dimana dilakukan secara terus menerus. Prinsip inilah yang menjadi tolak ukur dalam memelihara program PKK untuk kedepannya khusus dalam bidang pendidikan dan ketrampilan.

Upaya organisasi PKK dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan pendidikan, ketrampil serta pelatihan bagi kaum perempuan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan wadah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan terus pemberdayaan perempuan lewat program-program didalamnya. Dengan tujuan menggerakkan partisipasi masyarakat ditingkat RT/RW, termasuk didalamnya mengelola program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi atau usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Dalam program UP2K yaitu untuk mendapatkan ekonomi keluarga(Nanih Mahendrawati)

Bukan hanya anggota PKK menjadi pusat perhatian dari semua programnya, tetapi peran ketua PKK juga sangat penting dalam menjalankan disetiap kegiatannya. Dalam melaksanakan kegiatan program PKK itu sendiri, itu disebabkan oleh kurangnya peran dari ketua PKK dan bagaimana kekuatan dari sosialisasi yang dilakukan selama menjalankan tugasnya. Maka dari itu meningkatkan kualitas PKK dalam masyarakat, baik pendidikan maupun ketrampilan. (Komitmen organisasi PKK menjadi kunci utama dalam keberhasilan ekonomi masyarakat (Novian).

Program kerja PKK tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok program, dimana memiliki tujuan utama untuk memudahkan tim penggerak PKK ini menjalankan tugasnya dan program kerjanya. Menurut (Shalfiah, 2013) menyatakan bahwa : (a) Program pokok : memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan sebutan 10 program pokok PKK. (b) program prioritas (5 tahun). Dalam program prioritas disebut juga dengan program keutamaan, adalah kumpulan program yang merupakan penjabaran dari 10 program pokok PKK sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak. (c) Program kera tahunan adalah kumpulan program kerja yang merupakan penjabaran dari program prioritas untuk kurun satu tahun anggaran yang pelaksanaannya dapat merupakan kegiatan tim penggerak PKK sendiri ataupun kegiatan unit atau instansi yang dikerjasamakan dengan tim penggerak PKK adalah pengelolaan gerakan PKK yang berada ditingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan yang tugasnya mengelola dan menggerakkan kegiatan PKK, diketuai oleh istri pimpinan daerah (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala desa/Lurah), secara fungsional.

Sumber Pmebiayaan PKK adalah swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda organisasi PKK. Bantuan dari pemerintah dan bantuan dari sumber-sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong, pembantu dan peransang untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. PKK tidak berpatokan pada hal tersebut, melainkan kerjasama sama yang bertujuan untuk mewujudkan 10 program pokok tersebut. Sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga serta bagaimana meningkatkan peran dalam masyarakat melalui organisasi PKK. (Shalfiah, 2013) Dalam pelaksanaannya pemimpin dan pengurus PKK merupakan istri-istri para pejabat.

Menteri dalam Negri Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Menteri dalam negri Republik Indonesia menimbang : (a) bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dengan baik. (b) bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga. (c) Bahwa keputusan Menteri dalam Negri dan otonomi daerah nomor 53 tahu 2000 tentang Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti. (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c Pelu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan kepusan menteri diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan PKK diharapkan mampu meningkatkan mutu manusia. Lewat pemberdayaan ini dapat terwujudnya suatu pembangunan ekonomi masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pada peran organisasi PKK tingkat nasional Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang dihasilkan terlihat dari peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam tingkat nasional peran organisasi PKK sangatlah besar, karena sebagai acuan atau tolak ukur bagi organisasi PKK yang ada ditingkat daerah maupun wilayah terkecil yaitu RT/RW. Para kader PKK tingkat nasional dituntut agar bisa menjadi pemersatu organisasi PKK diseluruh wilayah indonesia, dengan membuat suatu progam yang dapat membawa kader-kader PKK yang berada dibawahnya bisa bersaing secara maksimal, baik ditingkat kelurahan, kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Dengan begitu organisasi PKK yang berada ditingkat terendah mampu meningkatkan kualitas SDM perempuan indonesia dan mewujudkan kemitraan organisasi PKK diseluruh wilayah. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponem bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan (keputusan menteri dalam negri dan otonomi daerah indonesia No : 53 tahun 2000).

Peran organisasi PKK tingkat nasional dapat kita lihat dalam setiap kegiatan yang telah diselenggarakan, seperti mengadakan lomba tingkat nasional, sebagai contoh, seperti apa yang dikemukakan oleh (Yanzi) diantaranya : 1) Lomba tertip administrasi, yang diadakan satu kali setahun, 2) Lomba pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), 3) Lomba pemanfaatan barang bekas. Dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi PKK tingkat nasional ini, diharapkan mampu memberdayakan perempuan indonesia agar bisa menjadi wanita karir sekaligus menjawab semua tantangan dalam era globalisasi. Kegiatan tersebut sebagai sala satu cara agar organisasi PKK bisa meningkatkan bakat yang dimiliki serta kemampuan mereka untuk beraing dengan organisasi PKK yang lainnya. Lewat kegiatan inilah yang dapat menguji sejauh mana organisasi PKK dapat mengukur kemampuannya masing-masing.

Peran Organisasi PKK tingkat Kabupaten/Kota pada Tim penggerak PKK di tingkat pusat samapai dengan kelurahan, PKK dikelola dan digerakan oleh tim penggerak PKK yang diketuai oleh istri pemimpin daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah) secara fungsional. Dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan PKK, justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri pemimpin daerah. Dari sisi programnya PKK diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, mencari nafkah dan pelaku pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberdaya dan mengerakan perempuan agar dapat mengembangkan potensinya dengan baik (Aslichati, 2011). Daerah mampu membentuk organisasi PKK yang memiliki daya saing yang setara dengan PKK yang berdiri dipusat, agar dapat menjadi mitra yang baik dan visi-misi PKK dapat berjalan dengan baik.

Ditingkat kabupaten/kota peran PKK sebagai forum pemberdaya keluarga secara terpadu, yang bisa berperan dan dibutuhkan untuk mendampingi rakyat banyak. Sala satu bentuk peran organisasi PKK di tingkat Kabupaten/kota adalah dengan membentuk tim tingkat RT/RW, sebagai wahana komunitas, Kabupaten/Kota, dimana semua program kerja yang dijalankan tentunya harus bisa bertanggung jawab kepada PKK tingkat Kabupaten/Kota. Organisasi PKK lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya serta mewujudkan visi-misi secara nyata dan memiliki dampak yang besar baik bagi organisasi, masyarakat, pemerintah daerah maupun bergu bagi bangsa dan negara (Dwi & Agustin, 2016)

Adapun menurut (Lestari, 2013). Dalam kehidupan bermasyarakat seperti desa, para individu sebagai warganya hidup bersama dengan rasa solidaritas yang tinggi, wujud solidaritas diantara warga desa ini adalah rasa saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain yang di landasi oleh rasa kewajiban moral. Rasa solidaritas itu terjadi pada masyarakat terutama pada ibu PPK. Bahkan sudah menjadi hukum alam dalam kehidupan individu bahwa keberadaan dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kebutuhan dasar individu untuk melangsungkan kehidupannya memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan kejiwaan, serta kebutuhan untuk berhubungan dengan dengan individu lainnya, diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan Organisasi PKK, melalui interaksi yang dilakukan, Organisasi PPK dapat mempertahankan dan meningkatkan kebersamaan ibu PPK terutama dalam hal meningkatkan ekonominya.

Dimana masyarakat selalu memilki rasa hidup berkelompok dan berinteraksi dengan manusia lainnya, akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah dan masyarakat semakin luas. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal

pikirannya, untuk menghadapinya dengancara manusia itu sendiri. Para ilmuan dibidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi dinamis, kondisi inilah yang disebut sebagai perubahan sosial. Dimana masyarakat merupakan cara untuk menganalisis masyarakat (Moremarnoko, 2017). Dari dinamika masyarakat tersebut terdapat konsep-konsep tentang proses pergeseran masyarakat serta perkembangan budaya.

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk didalamnya perubahan nilai, norma dan fenomena kultural. Sebuah perubahan akan selalu hadir dalam perjalanan hidup manusia yang menjadi dinamika kehidupan dan terus terjadi sepanjang hidup. Apakah perubahan itu terjadi secara cepat atau lambat itu tergantung beberapa besarnya perubahan tersebut memasuki suatu individu atau kelompok masyarakat, baik di desa maupun di kota, (Moremarnoko, 2017)

Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor Salam (Moremarnoko, 2017), antara lain : a. Penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran), b. Modal, antara lain sumber daya manusia ataupun modal finansial, c. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, d. Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial, e. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah tentu dalam membangun kekuasaannya, f. Agen atau aktor, hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia. Tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individu dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat akan terus terjadi sepanjang perubahan-perubahan dalam masyarakat itu semakin banyak.

Simpulan

Peran organisasi PKK dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara menjalankan program-program yang mengarah pada peningkatan ekonomi. Serta pemberian motivasi dan sosialisasi yang rutin yang terus dilakukan oleh PKK. Peran PKK dalam pemberdayaan ini sangatlah menjadi tolak ukur dari setiap program yang akan dijalankan, maka dibutuhkan tekad yang kuat dari PKK dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan programnya. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan pemanfaatan 10 program pokok PKK yang menjadi kekuatan utama dari organisasi PKK tersebut. Sehingga tujuan dari terbentuknya organisasi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bisa tercapai dengan baik.

Referensi

- Anshar. (2017). *Peran Dan Dampak Program Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan*.
- Aslichati. (2011). *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*. *Jurnal universitas terbuka*.
- Desi Arisandi. (2015). *Peran Pkk Di Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, 3(4), 1885–1899. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dwi, R., & Agustin, H. (2016). *Studi Tentang Peran Ketua Pkk Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Barat Kabupaten Malinau*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 4(2), 267–279. Retrieved from [ejournal.pin.or.id/.../11Ripca Dwi HADI Agustin \(01-23-17-12-19](http://ejournal.pin.or.id/.../11Ripca Dwi HADI Agustin (01-23-17-12-19)
- Jhovan. (2012). *Peran Ketua PKK Dalam Pelaksanaan Program PKK Di Kecamatan Malinau Barat*, 3(4).
- Kadma. (2017). *Peran Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda*. *E Journal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 969–978.
- Lestari. (2013). *Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar*. *Komunitas*, 5(1), 74–86. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2376>
- Lilik Aslichati. (2011). *Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan*. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7, 1–7.
- Moremarnoko. (2017). *Organisasi Pemberdayaan Perempuan*, 1(5).
- Nanih Mahendrawati. (n.d.). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*.
- Novian. (n.d.). *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. *Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung*.
- Ripca. (n.d.). *Studi Tentang Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, 4(2).
- Shalfiah, R. (2013). *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 975–984.
- Suparjan. (2003). *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*.
- Tim Penggerak PKK. (n.d.). *Tim Penggerak PKK*.
- Undang-undang. (2013). *Pembangunan Sosial Perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta.
- Yanzi, I. (n.d.). *peranan PKK dalam peningkatan pemberdayaan wanita*, (2).